

KONSTRUKSI DASAR MASALAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN CIANJUR DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Moch. Agung Lukmanul Hakim¹⁾, Cecep Darmawan²⁾, Leni Anggraeni³⁾

¹²³FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

¹mochagung.lukmanulhakim@upi.edu

²cecep darmawan@yahoo.com

³l_anggraeni@upi.edu

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 4 Nopember 2022

Revisi, 11 Nopember 2022

Diterima, 31 Desember 2022

Publish, 10 Januari 2023

Kata Kunci :

Evaluasi

Implementasi

Kebijakan

Kepemudaan

Prosedur

ABSTRAK

Konfigurasi dan signifikansi dari seluruh indikator pengukuran dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan trajektori pencapaian tahun 2018 di Kabupaten Cianjur yang dikualifikasikan dalam performa rendah, tidak akan dapat menunjang perkembangan generasi muda menjadi pribadi dewasa yang mandiri, penuh potensi dan bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Tujuan terdalam konstruksi kebijakan kepemudaan untuk menempatkan kalangan muda dalam takhta tertinggi sebagai atraktor yang menjadi region magnetik akselerasi perubahan dalam realitas bermasyarakat masih merupakan fiksi kebijakan yang belum tercapai. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kombinasi melalui metode survei, studi implementasi dan studi evaluasi kebijakan dengan bertumpu pada pendekatan behaviorisme dan neo-institusionalisme. Bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sekalipun penyelidikan terkait persepsi sebagai orientasi nilai dalam taraf signifikansi tertentu merepresentasikan distorsi, namun pemuda Kabupaten Cianjur tidak pernah terlibat langsung dalam inklusivitas jaringan kebijakan kepemudaan yang secara diametrik ambivalen dengan persepsi konstruktif terhadap pelayanan kepemudaan yang wajib secara prosedur dilaksanakan Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna dan Gerakan Pramuka termasuk terhadap pembangunan pemuda berbasis pendekatan Organisasi 4-H. (2) Trajektori implementasi dari implementor kebijakan terkait masih terbatas pada skema dengan taraf signifikansi prakonsep yang belum otonom dan monoton, sehingga belum dapat mereduksi potensi masalah kepemudaan. (3) Keberadaan dari kekuatan institusi formal dan informal ternyata tidak secara ekspresif menghadirkan *guidelines* dan *constraints* baik dalam pemilihan tindakan, dalam melakukan proses proyeksi terkait probabilitas hambatan dalam tahapan implementasi maupun dalam membangun desain evaluasi kebijakan yang dapat diverifikasi dalam praktik global. Adapun bentuk implikasi krusial dari penelitian ini menghadirkan sebuah moralitas baru dalam melakukan proses penyelidikan terhadap kebijakan kepemudaan dalam mendorong transformasi pelayanan kepemudaan yang lebih moderat.



This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Moch. Agung Lukmanul Hakim

Universitas Pendidikan Indonesia

Email: mochagung.lukmanulhakim@upi.edu

1. PENDAHULUAN

Secara normatif bahwa pelayanan kepemudaan dalam UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, UU No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Permensos No. 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna dan UU No. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No. 2 tahun 2017 terkait Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi Undang-Undang termasuk berbagai peraturan lain sebagai tindak lanjut dari kerangka kebijakan utama tersebut, secara konkrit mempertegas disposisi Flanagan dan Christens (2011) terkait posisi sentral pemuda dalam pembangunan masyarakat dengan bertumpu pada tindakan kolektif, kesadaran rasional, tanggung jawab dan rasa keadilan. Penelitian ilmiah berkenaan dengan pendidikan politik pada tahap kali kedua telah menempatkan pemuda dalam takhta tertinggi sebagai atraktor berbagai perubahan (Flanagan dan Sherrod, 2010) untuk mencapai taraf signifikansi keadilan sosial (Zeldin dkk., 2014), yang menjadi cerminan kepedulian terhadap masalah bersama (Flanagan dan Faison, 2001), yang tidak jarang dimunculkan dengan resistensi (Mokwena, 2007). Sampai dewasa ini, tujuan dari kerangka kebijakan kepemudaan untuk menempatkan kalangan pemuda dalam mimbar agung atraktor perubahan melalui peranan krusial sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan masih merupakan fiksi etis dari kebijakan, karena secara faktual taraf pencapaian IPP Kabupaten Cianjur cukup rendah dalam keseluruhan variabel dan indikator pengukuran (Hakim, Darmawan dan Anggraeni, 2022) yang menjadi representasi ketidaksetaraan pembangunan pemuda.

Permasalahan ketidaksetaraan sebagai cakramanggihan yang telah melibatkan kalangan pemuda, tidak berbeda dengan situasi atmosfer yang ada di seluruh daerah termasuk Kabupaten Cianjur. Bahwa keseluruhan populasi pemuda mencapai lebih dari setengah juta dengan konfigurasi perbandingan gender 255 ribu perempuan dan 163 ribu laki-laki. Bahwa pencapaian rerata rentang masa pendidikan pada pemuda Kabupaten Cianjur memiliki kisaran 9,10 tahun dengan 76,80% Angka Partisipasi Kasar (IPPI, 2019). Capaian rerata masa pendidikan dan Angka Partisipasi Kasar ternyata berbanding sejalan dengan distribusi fasilitas pendidikan dan alokasi biaya pendidikan (Zuilkowski, Samanhudi dan Indriana, 2017), yang dalam konteks global juga terjadi pada kalangan kelas bawah pemuda Australia dengan hambatan dalam memperoleh aksesibilitas terhadap Perguruan Tinggi dengan titik kulminasi masalah terkonsentrasi pada krisis maskulinitas (Stahl dan Young, 2019). Masalah keterbatasan kemampuan finansial masih merupakan isu dalam praktik global yang menjadi restriksi impian pemuda bahkan membentuk prasangka implisit tidak akan terdapat probabilitas untuk menggapai impian

tersebut di kalangan pemuda sendiri (Nilan dkk., 2011). Kondisi demikian, akan sama destruktifnya dengan sistem kasta sebagai struktur sosial rigid dan konservatif, yang menjadi latar belakang prima dari kondisi kelemahkarsaan kalangan muda di India dalam kondisi infinitas kemiskinan lintas generasi (Singh dan Mukherjee, 2019) sebagai cermin kondisi sosial kultural yang sulit dirubah.

Angka Kesakitan di Kabupaten Cianjur yang melibatkan generasi muda telah mencapai nilai 9,38% yang jauh lebih tinggi dari proporsi dalam skala Provinsi dan Nasional dengan pencapaian 7,68% dan 8,13% secara berurutan (IPPI, 2019). Situasi demikian kemudian diperburuk dengan persentase perokok aktif kalangan pemuda yang melebihi taraf nilai signifikansi pada skala pengukuran Provinsi dan Nasional yang masing-masing mencapai 31,61%, 29,80% dan 26,34% (IPPI, 2019). Bahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur pada September 2019 telah berhasil mencatat peningkatan 94 kasus baru positif HIV/AIDS (Republika, 2019) dengan mayoritas kasus homoseksual (Regional Kompas, 2019) sebagai implikasi logis dari perilaku beresiko (Media Indonesia, 2021), yang mungkin tidak terakomodasi dalam metode partisipasi multi-fase (Moeliono, Anggal dan Piercy, 2016) melalui skema sistemik pendidikan seksual (Mulya, 2018). Sebagai indikator lain dari bidang kesehatan dan kesejahteraan, nilai persentase pengangguran kalangan pemuda masih cukup tinggi dengan kisaran 23,78% yang berakar pada masalah kurikulum pendidikan dan *soft skill* yang tidak cukup sesuai tuntutan dunia kerja (IPPI, 2019), sehingga dewasa ini diperlukan pelembagaan perusahaan sosial dengan kurikulum pengembangan taraf keterampilan kewirausahaan (Fadeyi dkk., 2015) untuk mempersiapkan kehidupan kalangan pemuda yang lebih produktif.

Implikasi globalisasi dan masyarakat informasi akan terlihat dalam trajektori perjalanan sejarah, namun menimbang terdapat perkembangan teknologi, ekonomi dan realitas sosial-politik, maka melalui perspektif yang jauh lebih moderat bahwa implikasi tersebut hanya merepresentasikan pengaruh dalam konteks tertentu (Krall dan Knapp, 2021). Berbagai bentuk pilihan dan standardisasi kehidupan merupakan bentuk realitas paradoks, karena berjalan bersinggungan dengan titik bifurkasi dari kesenjangan sosial dengan tingginya persentase kalangan pemuda yang tidak dapat memperoleh pekerjaan (Knapp dan Waechter, 2021). Keterbatasan lapangan kerja di Kabupaten Cianjur merupakan bagian dari kulminasi ketidaksetaraan struktural, namun masih lebih baik secara aksiologis dibandingkan kawasan Amerika Tengah, Desamparados dan Sayopago yang populer dengan eksklusivitas lapangan pekerjaan dan stigma kekerasan sebagai antededen spesifik dari marginalisasi pemuda (Salas dan Sáinz, 2019). Dalam konteks dan kasus

tertentu, penyelenggaraan survei berkaitan lapangan pekerjaan selalu merepresentasikan bahwa perusahaan dan pekerja sangat memahami masalah kelas sosial yang berjalan bersimpangan. Sebagian mempunyai kekhawatiran mendasar tentang tingkat kesejahteraan pemuda, sementara pihak lain menempatkan isu-isu lapangan pekerjaan sebagai propaganda dalam menampilkan resistensi terhadap kemunculan kembali kelas pekerja.

Di Kabupaten Cianjur, keterlibatan pemuda dalam memberikan pengawasan terhadap perilaku birokrasi sebagai salah satu bentuk indikator pada variabel bidang kepemimpinan dan partisipasi belum melembaga menjadi budaya demokrasi secara memadai, karena hanya mencapai taraf 10% (Hamirul dan Pratiwi, 2020). Sebagai sebuah probabilitas, bahwa rendahnya keterlibatan politik pemuda karena eksistensi kualifikasi partisipasi politik konservatif tidak cukup relevan dalam menyampaikan preferensi mereka. Atas dasar situasi tersebut, kalangan muda di Tunisia dan Mesir misalnya memutuskan untuk melakukan transformasi dengan membangun struktur utama arena politik melalui bermusik rap dan asosiasi sipil (García and Montijano, 2019). Sebagai kalangan marginal di Ekuador, pemuda telah menempatkan entitas seni sebagai representasi distingsi berkaitan situasi sosial yang berkonsentrasi pada pembaharuan ikatan sosial (Cerbino, Panchi dan Voirol, 2019). Atau bagaimana di Tiongkok, kalangan pemuda berhasil membentuk partisipasi individualitas berbasis transformasi digital sebagai arena partisipasi politik dengan konfigurasi terbaru (Fu, 2019). Generasi muda Cianjur mempunyai kecenderungan untuk tidak terlibat lebih jauh dalam realitas politik, yang secara normatif jauh berbeda dengan pemuda Fiji dengan militansi mumpuni, sehingga berani mengambil keputusan mengajukan permohonan terkait perubahan konstitusi keempat (Vakaoti, 2019).

Melalui kajian perbandingan di sembilan negara Eropa bahwa sosialisasi tetap menjadi tumpuan dari keterlibatan politik kalangan muda di tengah ketidaksetaraan dan kesenjangan yang semakin terbuka (Giugni dan Grasso, 2021). Pada saat yang sama, latar belakang keluarga, pendidikan dan sumber daya yang berhubungan erat dengan keadilan sosial dalam mekanisme ekonomi dan mobilitas sosial sampai saat ini menjadi variabel distingsi dari keterlibatan pemuda dalam realitas politik (Kiess, 2021) yang terus menuai problematika krusial di negara Jerman. Determinasi secara individualitas cukup fundamen dalam melakukan penyelidikan signifikansi holistik masalah partisipasi dan ketidaksetaraan pemuda di Yunani, bahwa kondisi ekonomi secara kontekstual mempengaruhi mobilisasi kalangan muda yang heterogen dalam memperjuangkan hak mereka melalui partisipasi politik yang belum dilembagakan (Kalogeraki, 2021). Untuk menjamin keterlibatan politik melalui kualitas repertoar perilaku dalam skala lebih luas, di Swiss

misalnya bahwa kompleksitas pada sistem politik harus diimbangi dengan pelembagaan budaya pengembangan keterampilan, pengetahuan dan sumber daya, yang berimplikasi menjanjikan terhadap partisipasi politik generasi muda (Holecz, Fernández dan Giugni, 2021).

Dalam ranah diskriminasi dan gender, kalangan muda perempuan yang belum menikah pada rentang usia 15 tahun lebih di Kabupaten Cianjur bahkan dipandang tidak sesuai dengan adat istiadat, sehingga memperoleh label sebagai 'perawan tua' (IPPI, 2019). Persentase perempuan dengan rentang usia 16 sampai 24 tahun yang tengah menjalani masa pendidikan hanya berkisar 20,90%, sementara yang berhasil mendapatkan kesempatan bekerja pada bidang formal tidak lebih dari nilai 13,37% (IPPI, 2019). Permasalahan diskriminasi dan gender di belahan dunia selatan masih lebih baik secara substantif dibandingkan dengan di Kabupaten Cianjur. Di negara Meksiko dan Amerika Latin misalnya, kalangan muda perempuan mempergunakan seni musik sebagai profesi dalam menunjukkan diskursus feminisme dalam korelasi dengan kesetaraan gender yang direstriksi langsung struktur sosial (Alcazar, 2019) sebagai pemberdayaan serta perluasan ruang gerak konvensional (Karupiah, 2019). Kontinuitas antagonisme sosial-politik, eksklusivitas lapangan kerja dan konstelasi pendidikan dengan aksesibilitas terbatas merupakan akar permasalahan kesetaraan gender yang berimplikasi signifikan terhadap kalangan muda dalam konteks realitas perkembangan sosial (Bottrell dan Pessoa, 2019) terkait kualifikasi dan signifikansi yang bersifat personal, seperti situasi pemuda pasca konflik di Delta Niger (Iwilade, 2019).

Terdapat banyak generasi muda dalam praktik global mendapatkan perlakuan diskriminatif berbasis rasial (Kubiliene, 2014), yang berdampak langsung terhadap mental dan perilaku anti sosial (Tobler dkk., 2012). Di Kabupaten Cianjur masalah diskriminasi terhadap perempuan memiliki trajektori jalinan korelasi positif dengan budaya patriarki (IPPI, 2019). Kondisi demikian, juga terdapat dalam literatur Barat konvensional yang terinspirasi pandangan teologis bahwa Hawa merupakan entitas yang paling bersalah dibalik dosa yang dilakukan Adam terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Perkembangan feminisme sebagai perjuangan untuk mencapai titik tertinggi kesetaraan gender mendapatkan resistensi terbuka dari pendekatan interpretasi rigid terhadap dogma agama (Henderson dan McManus, 1985). Penggunaan terminologi *Father* dan *The Son God* yang secara umum dipercaya oleh masyarakat Barat, justru mendorong kelahiran kultus kepercayaan bahwa kalangan pria merupakan kualitas cerminan dari kepribadian Tuhan (Long, 2000). Bahwa keberadaan pria dipandang sebagai eksistensi mutlak tanpa celah otoritas dengan kedudukan sangat terhormat dalam kehidupan (Daly, 1973), sementara keberadaan perempuan sendiri tidak lain merupakan konfigurasi

dari kehendak bebas secara brutal kaum pria sebagai situasi konservatif yang sulit untuk dirubah.

Diametral tajam antara akumulasi pencapaian kebijakan kepemudaan dengan IPP Kabupaten Cianjur yang masih rendah dengan tujuan kebijakan yang menuntut kalangan pemuda sebagai akselerator cakramanggilangan perubahan, akan menjadi permasalahan kompleks di masa mendatang. Dengan asumsi dasar bahwa trajektori perubahan indikator IPP Kabupaten Cianjur berjalan secara linier dengan nilai IPI dengan regularitas pertumbuhan relatif stagnan, secara teoritik Pemerintah Cianjur akan semakin terbebani untuk berhadapan dengan implikasi dari era disrupsi seperti insgutan kepercayaan, masalah dalam keluarga dan peningkatan tindak kriminalitas (Fukuyama, 2004; 2010; 2016) sebagai anteseden rasional peningkatan rasio bebas ketergantungan (Muhaemin, 2021) terutama pada kulminasi dari bonus demografis (Hakim, 2022). Dengan mempertimbangkan masalah demikian, sebagai bentuk dari kebaruaran penelitian harus diselenggarakan penyelidikan ilmiah terkait konstruksi mendasar dari masalah implementasi kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur bertumpu pada pendekatan behavioralisme dan neo-institusionalisme. Secara lebih spesifik, penelitian akan terkonsentrasi pada persepsi distingtif kalangan pemuda di Kabupaten Cianjur terhadap kerangka kebijakan kepemudaan nasional dan praktik global, tingkat kohesivitas dari skema implementasi dengan prosedur kebijakan dan akomodasi proyeksi potensi masalah kepemudaan termasuk peran dari institusi baik dalam mengupayakan kohesivitas implementasi, menghadapi hambatan pada tahap implementasi maupun membangun desain holistik evaluasi kebijakan kepemudaan yang dalam praktik global dapat diverifikasikan.

Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bahwa konstruksi dari diametral antara pencapaian IPP Kabupaten Cianjur yang rendah dan tujuan utama kerangka kebijakan kepemudaan yang akan menempatkan pemuda sebagai atraktor perubahan, secara teoritik dapat diidentifikasi melalui penyelidikan pengembangan jalinan modal sosial antara kelompok sasaran dan implementor kebijakan. Interaksi dan interdependensi pada rentang waktu tertentu dalam masyarakat secara alamiah membentuk struktur modal sosial (Lake dan Huckfeldt, 1998) sebagai kepercayaan, pengetahuan jaringan sosial dan norma yang memungkinkan probabilitas kerjasama (Kahne, Chi dan Middaugh, 2006) dalam masalah politik kewarganegaraan (Zhong, 2014; Kim, 2005; Zhang dan Chia, 2006; Fahmy, 2015). Sebagai salah satu entitas pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjalankan peran krusial bidang pendidikan dalam penguatan jaringan modal sosial dengan akselerasi prima (Algan, Cahuc dan Shleifer, 2013) dan proyeksi keterlibatan dalam sosial-politik (Helliwel dan Putnam, 1999), yang ditentukan oleh tingkat

signifikansi peran media informasi (Uslaner, 1998) baik internet (Kim, 2006) maupun media sosial (Ferucci, Hopp dan Vargo, 2019). Kerangka signifikansi dalam tahapan pengembangan jaringan modal sosial sebagai representasi implementasi kebijakan kepemudaan, secara lebih prima dapat dikaji melalui pendekatan neo-institusionalisme dan behavioralisme.

Dalam pendekatan behavioralisme bahwa konstruksi dasar dari permasalahan implementasi kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur akan berkaitan dengan persepsi pemuda terhadap kerangka kebijakan sebagai bentuk diskursus penunjang atau penghalang kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, konstruksi dasar masalah implementasi secara normatif tidak menutup probabilitas dapat ditentukan oleh tingkatan antusiasme dan keinginan keterlibatan dalam pelayanan kepemudaan termasuk bagaimana kalangan pemuda telah dikonstruksikan ke dalam inklusivitas jaringan kebijakan kepemudaan. Bagaimanapun juga, keberadaan prasangka secara implisit dan diskriminasi sekalipun secara praktik berdasarkan pada gagasan usang yang terlihat konvensional, ternyata dapat menghadirkan implikasi krusial terhadap implementasi kebijakan (Hardin dan Banaji, 2013). Bahwa tingkat antusiasme serta keinginan keterlibatan pemuda dalam pelayanan kepemudaan akan memiliki ruang trajektori yang berjalan linier dengan nilai, identitas serta motivasi sosial, keadilan prosedural dan jalinan kepercayaan yang terdapat pada kerangka kebijakan sendiri. Melalui motivasi perilaku kooperatif demikian dapat dilakukan proyeksi berkaitan probabilitas keterlibatan dalam kebijakan dengan pemetaan karakteristik psikologi kerja sama (Tyler, 2013), distorsi dalam interaksi (Shelton, Richeson dan Dovidio, 2013) dan distorsi dalam konteks gender (Fiske dan Krieger, 2013).

Operasionalisasi distingsi pendekatan behavioralisme dalam aplikasi analisis kebijakan publik adalah *Policy Network Analysis* (PNA) dengan konsentrasi khusus terkait perangkat kebijakan dan sejumlah informasi valid yang dipergunakan dalam peningkatan kualitas keputusan sebagai respons terhadap berbagai kritikan (Howlet dan Mukherjee, 2018). Untuk menjamin akselerasi dalam perbaikan konteks sebuah keputusan, maka terdapat penyelidikan konfigurasi aktor yang terlibat dalam jaring kebijakan baik sektoral internal pemerintahan secara hirarkis maupun sektor swasta (Mikkelsen, 2006) sebagai pendekatan analisis aktor yang harus direstriksi melalui manajemen proses (De Bruijn dan Heuvelhof, 2002). Kerangka dimensi ideasional dalam jaringan kebijakan sebagai preferensi akan meningkatkan signifikansi krusial dari analisis jaringan kebijakan dengan konsentrasi terhadap preferensi, yang dalam studi Berman (1998) merupakan konsepsi keyakinan terprogram. Sehingga analisis tersebut melampaui ruang konsepsionis jaringan sebagai intermediasi kepentingan dari Marsh

dan Rhodes (1992) yang bertumpu pada keberadaan agensi dan struktur pilihan rasionalitas dari Dowding (2001) yang tidak harus menjadi perangkat retorik (March dan Smith, 2000) dan ideologi dari pergeseran arah paradigma (Hay, 2004). Karena itu, ide tertentu dari aktor dalam analisis jaringan akan diperlakukan sebagai variabel bebas, sementara jaringan serta hasil kebijakan merupakan bentuk variabel intervensi dan dependen (Kisby, 2007).

Dalam pelaksanaan kebijakan kepemudaan bahwa analisis jaringan kebijakan akan memberikan konsentrasi terkait bagaimana pemuda sebagai kelompok sasaran kebijakan ditempatkan dalam jaringan kebijakan secara inklusif, kepentingan setiap implementor, formasi implementor termasuk berbagai bentuk regulasi hukum yang mengatur perilaku dalam arena tindakan. Pada lain sisi, kerangka kerja koalisi dan advokasi sebagai formasi model lain berbasis behaviorisme (Gil-Garcia dkk., 2017), yang secara spesifik diformulasikan dalam melakukan pemecahan berbagai masalah dengan taraf kompleksitas tinggi (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1993; 1999; 1983). Ketika tidak terdapat konsensus terkait tindakan berbasis kolektivitas karena diferensiasi terbuka spektrum preferensi serta perubahan kebijakan antara berbagai pihak, maka pendekatan tersebut dapat diterapkan sebagai rekonsiliasi pertentangan (Hoppe dan Peterse, 1993), yang dalam analisis kebijakan publik secara ilmiah telah merepresentasikan signifikansi cukup krusial (John, 2003; Schlager, 1995; Schlager dan Blomquist, 1996), seperti dalam bidang kebijakan terkait energi dan lingkungan (Weible dan Sabatier, 2007). Dalam penerapan kerangka kerja koalisi dan advokasi terdapat sejumlah komponen yang harus dikalkulasikan jauh lebih seksama seperti parameter dengan stabilitas yang konsisten, subsistem kebijakan, sistem keyakinan, koalisi advokasi, perantara kebijakan, sumber daya, tempat, mekanisme perubahan kebijakan berbasis bukti ilmiah, kebutuhan kebijakan termasuk peristiwa eksternal (Sabatier dan Pelkey, 1990; Sabatier, Hunter dan McLughlin; 1993).

Dalam perspektif lain, bahwa keberadaan institusi sebagai bagian dari struktur yang mempengaruhi artikulasi serta konfigurasi tindakan masyarakat secara umum dengan signifikansi dan implikasi yang ada sedari zaman Aristoteles telah menjadi subjek penyelidikan. Para sarjana pada bidang ilmu politik dalam konteks yang lebih moderat sedari lama telah memberikan perhatian mendalam terhadap peran penting suatu institusi politik dalam hubungan korelasinya dengan garis utama dari struktur dan artikulasi utama perilaku yang lebih berjalan beririsan bersama berbagai tujuan kolektif (Peters, 2012) karena memberikan implikasi dalam konteks situasi tertentu (Thelen, 1999). Eksistensi kekuatan dari institusi baik secara formal (Senge, 2013) seperti kebijakan, regulasi konstitusi dan hukum (March dan Olsen, 2005) maupun secara

informal seperti transparansi, kesadaran politik, akuntabilitas dan partisipasi (Sewell, 1992) merupakan regional magnetis dari penyelidikan berbasis pendekatan neo-institusionalisme. Bahwa kualitas ekuivalensi antara taraf signifikansi institusi dalam menentukan pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai preferensi tertentu akan berbanding lurus dengan pelembagaan kekuatan institusi tersebut (March dan Olsen, 1983) dalam membangun desain *guidelines* dan *constraints* tanpa celah yang diberlakukan taat asas pada arena pilihan (Laumann dan Knocke, 1987; Di Maggio dan Powell, 1991; Skocpol, 1996).

Peran suatu institusi secara krusial akan menuntun perilaku pihak yang terkait dalam arena tindakan berbasis konsensus, bahkan pemilihan kebijakan yang paling dipandang rasional dalam pertimbangan pemangku kebijakan, sehingga keberadaan institusi menjadi atraktor dari penyusunan kebijakan publik (Peters, 1979). Dengan mempertimbangkan hal demikian, pencapaian IPP yang masih rendah di Kabupaten Cianjur sendiri secara hipotetik berdasarkan pendekatan neo-institusionalisme akan terkonsentrasi pada kegagalan institusi dalam menjalankan peran dalam korelasinya dengan *guidelines* dan *constraints* terkait penentuan pilihan tindakan dan keputusan dari implementor kebijakan baik Disparpora, Karang Taruna Kabupaten, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur, DPD KNPI maupun pemerintah desa pada arena tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa pemilihan tindakan terkait program pelayanan kepemudaan yang akan direalisasikan implementor kebijakan dan secara substantif tidak sesuai dengan kerangka kebijakan, menjadi bentuk kegagalan besar institusi yang tidak jarang ditampilkan melalui samaran kontinum pembenaran dari diskursus penghambat kebijakan seperti fisibilitas politik (Galston, 2009), masalah keterbatasan anggaran (Quiggin, 2009) dan kelembagaan sendiri (Immergut, 2009). Peran dari institusi terkait upaya memberikan batasan dan arahan dalam pemilihan keputusan pada arena tindakan termasuk pemilihan desain evaluasi kebijakan, dapat ditindaklanjuti secara lebih kompleks melalui analisis perkembangan kelembagaan dengan berbasis pendekatan neo-institusionalisme.

Analisis perkembangan kelembagaan dipergunakan dalam melakukan prosesi penyelidikan terhadap konfigurasi perilaku pihak yang terlibat dalam suatu jaringan kebijakan, yang secara langsung ditentukan ragam kekuatan institusi sendiri seperti sumber daya finansial, lingkungan fisik dan sejumlah pengaturan kelembagaan lain (Ostrom, 2011; 2015). Bahwa ruang konfigurasi dari perilaku dan interaksi di antara sejumlah pihak dalam korelasinya dengan kekuatan eksternal yang sebagai kualitas pengaturan, secara otomatis akan membangun arena tindakan yang secara mumpuni akan mencerminkan proyeksi tentang berbagai probabilitas pencapaian perjuangan

preferensi sebagai pilihan tindakan yang memang dimungkinkan. Kebijakan publik dalam perspektif analisis perkembangan kelembagaan tidak lain sebagai formulasi dari keputusan yang mencapai taraf signifikansi konsensus politis, sehingga bentuk konsentrasi dari analisis perkembangan kelembagaan terkait dengan aspek regulasi hukum yang diberlakukan secara taat asas. Dalam penelitian ini, model yang lebih fleksibel serta distingtif seperti institusionalisme pilihan rasional, institusionalisme sosiologis termasuk institusionalisme historis (Clemens dan Cooks, 1999), secara normatif akan dipergunakan sebagai pendekatan untuk melaksanakan penyelidikan terhadap sejumlah komponen analisis perkembangan kelembagaan.

Sekalipun kemunculan institusionalisme sosiologis terkait dengan kelemahan mendasar pada institusionalisme pilihan rasional (Lecours, 2005), namun demikian analisis dan falsifikasi dalam institusionalisme sosiologis bercorak konstruktivisme (Lasan, 2014) yang sebelum tahun 1970-an masih berbentuk abstraksi dari berbagai realitas secara distingtif (Jacobi, 2011). Keberadaan institusi dalam sudut pandang institusionalisme sosiologis merupakan struktur signifikansi sosial yang akan terus secara dinamis mengalami perubahan dengan karakteristik otonomi dalam korelasi dengan perubahan perilaku (Zafirovski, 2004). Realitas sosial tidak hanya berkaitan dengan arena tindakan dan hubungan interaktif belaka, lebih dari itu sebagai entitas ruang dimensi kultural yang secara informal memberikan pengaturan terkait dengan korelasi di antara pihak dalam arena tersebut (Buhari-Gulmez, 2010). Bahwa proses perubahan sosial bagaimanapun juga dimulai dengan pelembagaan nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat yang bertumpu pada kekuatan formal (Santoso, 2013). Pendekatan institusionalisme sosiologis dalam konteks pelayanan kepemudaan ini, diterapkan untuk melakukan penyelidikan terhadap atribut komunitas dan sejumlah aturan informal (Ostrom, 2010) yang dipergunakan. Bentuk atribut komunitas pada penelitian akan merujuk pada kualitas kepercayaan, sementara aturan informal akan berorientasi pada pilar budaya seperti *Ngaos*, *Mamaos* dan *Maenpo*.

Perang Dingin pada akhir tahun 1960-an menjadi titian tangga perkembangan institusionalisme pilihan rasional (Peters, 2012) yang ditandakan dengan sejumlah persaingan tajam dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan (Putra dan Sanusi, 2019) dengan seluruh subjek penelitian terdapat pada level mikro, sehingga menghadirkan titian bifurkasi dari perkembangan pilihan rasional dan behaviorisme dewasa itu dalam kajian ilmu sosial-politik (Bybee, 1997). Bahwa institusionalisme pilihan rasional hadir dengan paradigma bahwa perilaku seseorang akan bergantung pada signifikansi kepentingan sebagai preferensi yang harus diperjuangkan, karena pilihan rasional akan memuat kerangka intensionalitas

(Weyland, 2002). Posisi dari institusi dalam memberikan pengaturan tentang perilaku aktor menjadi kebaruan yang sengaja dimunculkan, karena institusi sendiri mempunyai peran yang memang sentral dalam penyusunan kebijakan dengan mengakomodasi seluruh kepentingan (Ivanica, 2006). Pengambilan keputusan dalam perspektif institusionalisme pilihan rasional dibangun berdasar pada kalkulasi cermat terkait berbagai probabilitas yang mungkin ada dengan mempertimbangkan konfigurasi potensi yang ada (Ingram dan Clay, 2000). Pada penelitian ini, institusionalisme pilihan rasional diterapkan untuk memberikan penyelidikan tentang sejumlah komponen dari analisis perkembangan kelembagaan seperti lingkungan biofisik, regulasi, kejadian eksternal, kondisi aksi dalam subsistem kebijakan (Ostrom, 2010).

Kathelen Thelen pada tahun 1994 telah memperkuat konstruksi dari institusionalisme historis (Mahoney, 2017; Bleich, 2017) yang memberikan arah penekanan terhadap institusi tidak hanya memperbincangkan regulasi, melainkan juga tentang kebiasaan, standar moralitas, norma dan ide (Skocpol dan Pierson, 2002; Sorenson, 2015). Ketika pelembagaan institusi dalam sudut kajian institusionalisme sosiologis akan menghadirkan format nilai dan identitas tertentu, maka pelembagaan kekuatan institusi dalam perspektif institusionalisme historis akan selalu hadir dalam ranah samaran kontinum dengan koherensi terhadap tekanan waktu dan ruang. Eksistensi institusi dan arena tindakan berbasis konsensus yang ada pada kurun waktu dewasa ini merupakan bingkai konfigurasi dari kulminasi perkembangan di masa terdahulu. Dalam konteks studi pelayanan kepemudaan dalam penelitian ini, bahwa institusionalisme historis dipergunakan dalam menganalisis taraf perkembangan kebijakan kepemudaan dengan parameter *displacement*, *layering*, *drift* dan *convention*. Selain itu, institusionalisme historis juga akan diterapkan untuk melakukan penyelidikan holistik berkaitan jalur kelaziman, trajektori waktu, *conjuncture* dan persebaran ide pada institusi yang mempunyai kewenangan dalam pelayanan kepemudaan selama satu dekade terakhir.

2. METODE PENELITIAN

Secara umum, bahwa desain dari penelitian yang melakukan integrasi antara teori berbasis pada behaviorisme dan neo-institusionalisme ini menerapkan model *Concurrent Fembed* dengan melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Bentuk pendekatan dalam penelitian ini didominasi secara penuh oleh pendekatan kualitatif, karena pendekatan kuantitatif terbatas pada kuantifikasi data kualitatif dalam bentuk persentase, penentuan besaran sampel dengan rumus Slovin dan taraf signifikansi yang dipergunakan sekitar 95%. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kombinasi sebagai

kerangka gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, yang jauh lebih familiar dengan *Mixed Methods Research* (Creswell dan Clark, 2007) ataupun *Blending Research* (Thomas, 2003). Bahwa pendekatan gabungan dibangun melalui paradigma inkuiri untuk melakukan identifikasi terkait trajektori jalur dalam mengumpulkan dan menganalisis berbagai data secara relevan. Pendekatan tersebut dipilih dengan mempertimbangkan alasan bahwa penerapan dua pendekatan dengan karakteristik titik tilik yang jauh berbeda, akan lebih holistik serta realistis dalam menunjukkan hasil penelitian (Creswell dan Clark, 2007), selain pertimbangan rumusan masalah penelitian yang tidak mungkin dieksplorasi dengan pendekatan tunggal.

Bahwa rumusan masalah terkait persepsi kalangan pemuda terhadap program pelayanan kepemudaan baik dalam kerangka kebijakan nasional maupun pelayanan berbasis pendekatan Organisasi 4-H, termasuk pelaksanaan pelayanan kepemudaan dalam konteks pemerintah desa akan ditindaklanjuti dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survei. Pendekatan tersebut dipilih dengan mempertimbangkan hal yang terkait jumlah populasi penelitian yang terlalu besar untuk dieksplorasi secara mendalam melalui teknik pengumpulan data berbasis pendekatan kualitatif. Jumlah populasi pemuda di Kabupaten Cianjur dengan kualifikasi usia 15 sampai 29 tahun berdasarkan publikasi Cianjur dalam Angka tahun 2021 mencapai 575.450 pemuda, yang tersebar di 360 pemerintahan Desa/Kelurahan dalam 32 wilayah administrasi Kecamatan. Dengan menerapkan rumus Slovin dalam menentukan besaran sampel dan mempergunakan taraf signifikansi 95%, maka besaran sampel terkait kalangan pemuda berkisar 400 orang dan 190 pemerintah Desa/Kelurahan. Untuk menjamin probabilitas dan kualitas dari sampel yang merepresentasikan karakteristik distingsi populasi, besaran sampel untuk kalangan pemuda paling tidak berjumlah tiga orang dari setiap enam pemerintah Desa/Kelurahan di setiap 32 Kecamatan yang berbeda. Adapun teknik dalam penarikan sampel sendiri, hanya dapat dimungkinkan melalui sampel probabilitas secara acak, karena instrumen dari survei dalam format *Google Form* disebarluaskan melalui *Group WhatsApp* Kepala Desa se-Kabupaten Cianjur.

Rumusan masalah kali kedua berkenaan dengan kualitas trajektori kohesivitas dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan baik dengan kerangka kebijakan itu sendiri maupun program pembangunan kepemudaan berbasis penguatan modal sosial dalam praktik global, termasuk penanganan potensi masalah kepemudaan di masa mendatang, akan dieksplorasi secara mendalam dengan pendekatan kualitatif melalui studi implementasi kebijakan. Adapun rumusan masalah kali ketiga tentang peran krusial institusi dalam memberikan arahan dan batasan dalam pemilihan arah tindakan dari implementor kebijakan

kepemudaan baik pemerintah Desa, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur, DPD KNPI Cianjur, Karang Taruna Kabupaten Cianjur maupun Disparpora dalam mengupayakan kohesivitas berbagai pelayanan kepemudaan sesuai kerangka kebijakan, mengantisipasi sejumlah hambatan dalam tahapan implementasi termasuk membangun desain evaluasi kebijakan yang dapat difalsifikasi, secara holistik akan dilakukan proses penyelidikan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis perkembangan kelembagaan dan studi evaluasi kebijakan. berbagai informasi krusial yang diperoleh dari kalangan pemuda serta implementor kebijakan pelayanan kepemudaan, akan dikonfirmasi secara detail terhadap para pakar sebagai bagian dari penerapan triangulasi sumber, selain triangulasi berkaitan teknik pengumpulan data seperti survei, studi dokumentasi atau observasi dan yang paling utama adalah wawancara terstruktur.

3. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Persepsi dan Faktualitas Keterlibatan Pemuda

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin, maka besaran sampel dari pemerintah Desa di Kabupaten Cianjur dengan taraf signifikansi mencapai 95% akan menuntut keterlibatan 190 Kepala Desa yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah. Dengan mempertimbangkan wilayah administrasi Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 Kecamatan, secara otomatis dalam setiap Kecamatan paling tidak haruslah terdapat enam Kepala Desa yang terlibat aktif dalam penelitian melalui pengisian instrumen survei. Pada tanggal 27 April 2022 bahwa instrumen survei telah disebarluaskan secara langsung melalui *Group WhatsApp* dari 150 Kepala Desa Kabupaten Cianjur, yang sampai tanggal 1 Juni 2020 tidak menghasilkan informasi apapun. Rendahnya taraf signifikansi respons dan keterlibatan Kepala Desa Kabupaten Cianjur dalam proses penelitian sebagai sebuah probabilitas akan terkait dengan permasalahan teknis dan kompleksitas dari instrumentasi penelitian. Pada tanggal 2 Juni, kerangka instrumen penelitian berbasis survei dirubah dengan instrumen wawancara via telepon dengan cakupan partisipan dan ruang kompleksitas masalah yang lebih dipersempit secara kontekstual. Sekalipun demikian, informasi yang diperoleh melalui instrumen baru demikian ternyata jauh dari kualifikasi memadai karena kuantifikasi data kualitatif menunjukkan taraf signifikansi berkisar 33%, sehingga secara ilmiah tidak mungkin dipertanggungjawabkan sebagai hasil penelitian dengan tingkat kredibilitas cukup memadai.

Dengan mempertimbangkan faktualitas di lapangan bahwa proses penyebaran instrumentasi survei yang tidak sesuai dengan perhitungan awal yang mensyaratkan besaran sampel kalangan pemuda mencapai 400 orang dan hanya 193 pemuda yang terlibat dalam penelitian, maka sebagai implikasi rasional dari perihal tersebut akan berpengaruh

terhadap taraf signifikansi penelitian dengan batas toleransi kesalahan menembus 7,19%, lebih besar dari ketentuan semula. Berdasarkan hasil penyebaran instrumen survei dapat dilakukan penarikan kesimpulan sebagai proses generalisasi bahwa kalangan pemuda yang terlibat dalam penelitian ini, pada umumnya memang mempunyai tingkat antusiasme dan keinginan keterlibatan yang besar baik terhadap program pelayanan kepemudaan yang terdapat dalam kerangka kebijakan nasional maupun program pembangunan pemuda berbasis pada pendekatan Organisasi 4-H. Persepsi konstruktif pemuda tersebut mencerminkan bahwa tidak terdapat indikator yang secara holistik memberikan ilustrasi terkait keberadaan prasangka implisit dan perasaan diskriminasi dengan berdasarkan gagasan usang konvensional yang dapat berimplikasi terhadap implementasi kebijakan (Hardin dan Banaji, 2013), sekalipun terdapat kecenderungan signifikan menimbulkan distorsi dalam hal psikologi kerja sama (Tyler, 2013), distorsi dalam interaksi (Shelton, Richeson dan Dovidio, 2013) dan distorsi dalam konteks gender (Fiske dan Krieger, 2013) yang ditemukan dalam trajektori skema implementasi kebijakan kepemudaan.

Sekalipun demikian, tingkat antusiasme dan keinginan keterlibatan kalangan pemuda dalam pelayanan kepemudaan sebagai pemetaan orientasi nilai merupakan fenomena sosial yang bahkan sangat amorphis dengan garis utama dari struktur dan artikulasi yang gampang mengalami berbagai perubahan secara mendasar, sehingga menampilkan signifikansinya berdasarkan kerangka interpretasi peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, Duverger (2014) memberikan penegasan bahwa analisis berkaitan orientasi nilai dapat mempunyai probabilitas menghadirkan distorsi secara objektif dalam taraf signifikansi tertentu. Persepsi pemuda sebagai bentuk kuantifikasi data kualitatif dalam bentuk persentase tidak mungkin secara akurat akan mencerminkan sistem nilai dari kalangan pemuda sendiri, karena secara natural tidak akan muncul melalui samaran kontinum yang deterministik dan matematis. Bahwa orientasi nilai seperti setuju dan tidak setuju tidak mempunyai jaminan akan termanifestasikan ke dalam perilaku secara penuh, karena orientasi nilai akan menentukan situasi paling akhir terkait pemilihan tindakan secara keseluruhan. Ketika behaviorisme menilai perubahan dalam masyarakat hanya dipengaruhi oleh perilaku secara tunggal, maka seorang fenomenolog akan memutuskan melakukan penyelidikan terhadap perilaku demikian sebagai objek etnografis dengan signifikansi dan implikasi yang hierarkis, sehingga kajian yang secara faktual hanya terbatas permukaan orientasi nilai seperti survei tidak akan memberikan probabilitas yang luas dalam mengeksplorasi lapisan signifikansi yang lebih mendalam.

Signifikansi dari persepsi kalangan pemuda Cianjur sebagai generalisasi yang dibangun

berdasarkan kerangka analisis induktif dapat mempunyai kecenderungan signifikan untuk berorientasi kepada artikulasi signifikansi yang telah dimaksudkan secara tersamar melalui kualifikasi tertentu dalam instrumen survei, sehingga akan terdapat probabilitas lain dengan hasil generalisasi berbeda ketika terdapat bentuk kualifikasi berbeda pada pertanyaan dan jawaban survei. Terlepas dari hal tersebut, secara umum pemuda di Kabupaten Cianjur tidak pernah terlibat sekalipun dalam program penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan baik dalam kerangka kerja Disparpora Cianjur, DPD KNPI Cianjur, Karang Taruna Cianjur, Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur maupun pemerintah Desa yang dinilai juga tidak turut serta secara aktif dalam menunjang perkembangan pemuda. Sebagian besar pemuda juga tidak pernah terlibat dalam program pasca sekolah, komunitas yang sehat, mobilisasi dari orang dewasa dan kewirausahaan baik sosial maupun politik sebagai program yang terintegrasi untuk mengembangkan kompetensi, karakteristik, kreativitas, koneksi, kepercayaan diri, kepedulian dan kontribusi pemuda terhadap lingkungan.

Sekalipun pemuda di Kabupaten Cianjur sebagian besar melaporkan terdapat banyak masalah kepemudaan yang mengarah pada kejahatan dan kenakalan remaja misalnya tindak kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang dan narkoba, konsumsi minuman beralkohol dan nikotin, perilaku seks bebas berbahaya dan perjudian yang bersifat patologis, namun secara umum hubungan serta komunikasi dengan anggota keluarga masih sangat baik, tidak terdapat indikator penurunan terkait fertilitas dan telah mempunyai perencanaan untuk masa tua nanti. Bahwa sebagian besar pemuda juga masih mempunyai tingkat kepercayaan sebagai kebijakan sosial baik terhadap teman sebaya, orang dewasa, pemimpin masyarakat maupun pemerintahan dewasa ini. Terlebih lagi kalangan pemuda masih mencerminkan kecenderungan signifikan untuk memberikan kepercayaan terhadap kerangka kebijakan kepemudaan, formasi implementor kebijakan kepemudaan dan kepentingan dari setiap implementor akan berkorespondensi positif dalam menunjang perkembangan pemuda menjadi pribadi dewasa yang mandiri, penuh potensi serta bertanggung jawab sebagai anggota suatu masyarakat. Sekalipun sampai dewasa ini, kalangan pemuda sendiri masih memiliki aksesibilitas yang sangat terbatas untuk terlibat dengan mandiri dalam intermediasi kepentingan, interorganisasi, interdependensi kekuasaan termasuk analisis jaringan sebagai pemerintahan.

3.2 Tingkat Kohesivitas Skema Implementasi terhadap Prosedur Kebijakan Kepemudaan

Faktualitas kalangan pemuda tidak pernah terlibat dalam program pelayanan kepemudaan dan aksesibilitas yang terbatas untuk terlibat dalam jaringan kebijakan secara substantif akan berkaitan

dengan tingkat kohesivitas pelayanan kepemudaan yang telah diselenggarakan oleh institusi bersangkutan terhadap prosedur kebijakan termasuk paradigma pembangunan pemuda pada praktik global berbasis penguatan modal sosial. Berdasarkan hasil wawancara terstruktur, kajian literatur dan berbagai dokumen dari institusi terkait dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sebagai kebijakan dalam skema implementasi secara substantif terkait baik dengan kerangka kebijakan nasional maupun pembangunan pemuda berbasis penguatan modal sosial pada praktik global, sekalipun masih terbatas capaian taraf signifikansi prakonsepsi yang belum otonom. Pelayanan kepemudaan terkecuali dari Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur diselenggarakan dalam trajektori yang kurang variatif seperti pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, jambore kalangan pemuda dan program lain yang berbasis kesadaran dengan implikasi kebijakan yang tidak dapat diidentifikasi. Pelayanan kepemudaan seperti pemberdayaan, kesadaran dan pengembangan baik kewirausahaan, kepemimpinan maupun kepeloporan memang mempunyai pemisahan signifikansi yang objektif, namun secara praktik kohesivitas signifikansi dari berbagai pelayanan kepemudaan tersebut menjadi dasar klaim dari institusi terkait merealisasikan pelayanan kepemudaan holistik yang secara faktual justru terfragmentasi.

Bahwa skema implementasi pelayanan kepemudaan dari implementor terkait tidak menunjukkan ekuivalensi perlakuan antara pelayanan kepemudaan dan tujuan kebijakan kepemudaan sebagai linieritas logika hukum sebagaimana dimaksudkan dalam kerangka kebijakan kepemudaan nasional. Terlebih lagi, bentuk pendekatan pembangunan pemuda dalam praktik global berbasis penguatan modal (Benson dan Pittman, 2002; Bowers dkk., 2015; Dimitrova dan Wium, 2021) seperti Organisasi 4-H, kewirausahaan sosial-politik (Lentsch, 2019; Ashta A, 2020; Bouckaert serta Van Den Heuvel, 2019; Guha serta Majumbar, 2020; Lundström dkk., 2014; Zhao dan Mao, 2021; Marques serta Dhiman, 2020), mobilisasi orang dewasa (Gil Clary dan Rhodes, 2006), komunitas sehat (Nakkula dkk., 2010) termasuk program pasca sekolah (Deutsch, 2017) masih berada dalam taraf signifikansi embrionik, sehingga dalam jangka pendek tidak dapat memberikan timbal balik terhadap pembangunan pemuda secara realistis. Skema implementasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur belum memiliki konteks ruang lingkup, program area termasuk aplikasi dan intervensi pembangunan pemuda baik dalam kerangka kebijakan nasional maupun pembangunan pemuda dalam praktik global. Terlebih lagi, motivasi sosial, identitas kultural, keadilan prosedur dan motif kepercayaan yang akan berimplikasi terhadap keadaan prasangka implisit, diskriminasi, distorsi interaksi, distorsi gender maupun psikologi

kerjasama tidak dapat diidentifikasi dalam skema implementasi kebijakan kepemudaan.

Skema implementasi dalam trajektori yang kurang variatif tersebut tidak akan memenuhi kebutuhan perkembangan pemuda pada tahapan transisi adolesens yang penuh gejala seperti penguatan kompetensi, nilai karakter, kreativitas, kepedulian, kepercayaan diri, koneksi dan kontribusi langsung terhadap masyarakat. Karena itu, skema implementasi dari institusi terkait, untuk dewasa ini belum dapat mereduksi pemetaan potensi masalah kepemudaan sebagai implikasi era disrupsi baik insytan kepercayaan, masalah dalam keluarga maupun kejahatan (Fukuyama, 2004; 2010; 2016) seperti pembunuhan (Greenwood dkk., 1996), perilaku seks berbahaya (Cantwell dan Rotheram-Borus, 2003), penggunaan obat-obatan terlarang (Benson, Flay dan Foster, 2003), pecandu zat nikotin (Biglan serta Severson, 2003), pecandu alkohol (Zucker, 2003) dan perjudian bersifat patologis (Jacobs, 2005). Konstruksi pelayanan kepemudaan dari implementor kebijakan harus mempertimbangkan dan mensintesis dasar-dasar behavioral kalangan pemuda dalam jaringan kebijakan seperti behaviorisme teleologis (Rachlin, 2021), behaviorisme molar (Baum, 2021), behaviorisme teoritis (Lopes, 2021), behaviorisme biologis (Donahoe, 2021) dan behaviorisme intensional (Foxall, 2021) untuk menempatkan keterlibatan kalangan pemuda ke dalam pelayanan kepemudaan sebagai responsivitas yang dikondisikan (*Classical dan Operant Conditioning*) melalui *Positive Reinforcement*.

3.3 Peran Krusial Keberadaan Institusi

3.3.1 Peran Institusi dalam Mengupayakan Kohesivitas Pelayanan Kepemudaan

Secara faktual, setiap implementor kebijakan kepemudaan telah mendapatkan penguasaan dasar terhadap informasi terkait komponen yang bekerja dalam formasi ACF seperti perantara kebijakan, mobilisasi sumber daya, akumulasi bukti empirik, kejadian eksternal, kebuntuan kebijakan kepemudaan, parameter yang relatif stabil, kebutuhan perkembangan pemuda dalam era disrupsi besar dan kluster implementor dalam jaringan kebijakan kepemudaan. Sekalipun demikian, penguasaan informasi mendasar tersebut tidak menempati kedudukan antaseden yang melahirkan agenda koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan pemerintah atau paling tidak mencoba membangun agenda bersama. Karena dalam pemetaan PNA selalu terdapat bentuk konsentrasi terhadap informasi utama dan perangkat kebijakan sendiri (Howlet dan Mukherjee, 2018), secara alamiah pembentukan kerangka koalisi advokasi ataupun agenda bersama sebagai program kemitraan dalam konteks institusional merupakan pemilihan tindakan paling seksama dalam mengupayakan kohesivitas dari berbagai pelayanan kepemudaan untuk menjamin pencapaian kepentingan dengan bertumpu pada prosedur

kebijakan. Faktualitas tidak teridentifikasi keberadaan langkah yang mumpuni dalam jaringan kebijakan, secara tidak langsung memberikan konfirmasi terhadap kebuntuan kebijakan kepemudaan. Dalam PNA terdapat pendalaman yang terkait konfigurasi implementor sebagai representasi klaster jaringan kebijakan baik pemerintah maupun sektor privat (Mikkelsen, 2006), dengan tidak mempergunakan manajemen proses dengan tujuan restriksi (De Bruijn dan Heuvelhof, 2002) bentuk pemilihan tindakan dapat menghadirkan penjelasan dari kebuntuan kebijakan.

Bahwa preferensi yang dalam penyelidikan dari Berman (1998) diidentifikasi sebagai keyakinan terprogram, akan terus diperjuangkan setiap implementor secara konsisten dalam jaringan kebijakan. Berdasarkan kerangka kebijakan kepemudaan, setiap implementor bahkan akan mempunyai preferensi yang secara distingtif akan berorientasi pada upaya strategis dalam menunjang perkembangan pemuda menuju pribadi dewasa yang bertanggungjawab. Setiap implementor bukan terminologi lain dari perangkat retorik (March dan Smith, 2000) yang direstriksi dengan diferensiasi paradigma (Hay, 2004). Konstruksi dari preferensi setiap implementor bahkan tidak memberikan jaminan akan mencerminkan keberadaan ide dalam jaringan kebijakan sebagai variabel independen (Kisby, 2007) yang bertumpu pada pilihan rasionalitas dan keberadaan agensi Dowding (2001). Tidak terlalu mengherankan secara aktual tidak terdapat langkah interorganisasi, interdependensi kekuasaan termasuk analisis jaringan pemerintahan (Rhodes, 2006) yang menembus batas intermediasi berbagai kepentingan (Marsh dan Rhodes, 1992). Jaringan kebijakan kepemudaan di wilayah Kabupaten Cianjur yang tidak mencerminkan pertukaran keyakinan inti dan sumber daya, penerapan langkah tunggal dan hubungan dialogis dengan kalangan pemuda, dalam konteks analisis kebijakan merupakan informasi akurat untuk menghadirkan penjelasan terkait faktualitas kalangan pemuda tidak dapat terlibat dalam pelayanan dan aksesibilitas terbatas dalam jaringan kebijakan kepemudaan.

Ketika diferensiasi tajam dari preferensi setiap implementor mendasari secara langsung kekosongan agenda bersama pada jaringan kebijakan kepemudaan, maka kerangka koalisi advokasi sebagai pendekatan berbasis behaviorisme (Gil Garcia dkk., 2017) dapat dipergunakan sebagai alternatif pemecahan masalah dengan taraf kompleksitas tinggi (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1993; 1999; 1983) yang memang dapat menghambat hubungan kemitraan serta koordinasi lintas sektoral. Rekonsiliasi pertentangan (Hoppe dan Peterse, 1993) yang secara ilmiah pada analisis kebijakan publik telah merepresentasikan signifikansi krusial (Schlager dan Blomquist, 1996; John, 2003; Schlager, 1995) misalnya pada bidang kebijakan

lingkungan dan energi (Weible dan Sabatier, 2010), justru tidak teridentifikasi sama sekali dalam jaringan kebijakan kepemudaan. Dalam subsistem kebijakan berbagai implementor terutama pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Disparpora tidak memuat proyeksi seksama tentang sistem keyakinan, komponen relatif stabil termasuk mekanisme perubahan kebijakan kepemudaan berbasiskan pada kerangka Sabatier dan Pelkey (1990) dan Sabatier, Hunter dan McLughlin (1987) seperti akumulasi bukti empirik, kebuntuan kebijakan dan peristiwa eksternal. Dengan demikian, kekosongan agenda bersama sebagai representasi perubahan kebijakan tidak berkorelasi dengan diferensiasi dari preferensi karena secara normatif seluruh kepentingan implementor akan mengarah pada upaya menunjang perkembangan pemuda.

3.3.2 Peran Institusi dalam Menghadapi Potensi Hambatan Implementasi Kebijakan

Hambatan dalam tahap implementasi terkait fisibilitas politik (Galston, 2009) secara faktual merupakan salah satu arah masalah besar dari sebagian implementor kebijakan seperti DPD KNPI dan Karang Taruna Kabupaten Cianjur, yang memang berimplikasi terhadap permasalahan sumber daya finansial (Quiggin, 2009). Setiap implementor kebijakan tidak mempunyai masalah fisibilitas politik yang berkaitan dengan preferensi dari kelompok kepentingan, karena secara internal telah menjadi sarana relevan untuk mengakomodasi setiap kepentingan yang harus diperjuangkan dalam jaringan kebijakan dengan laju determinasi tinggi. Masalah fisibilitas politik yang dihadapi oleh DPD KNPI dan Karang Taruna Kabupaten Cianjur justru terjadi dalam konteks hubungan transaksi dengan pemerintahan sebagai pemegang otoritas tertinggi terkait langkah strategis pembangunan pemuda. Terlepas dari kepentingan politik yang bersifat praktis, kedua implementor kebijakan tersebut sampai dewasa ini tidak pernah mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah Kabupaten Cianjur seperti halnya Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur yang telah menjadi mitra krusial pemerintah sedari lama. Oleh karena itu, tidak mengejutkan ketika kedua pelaksana kebijakan tersebut harus bergerak secara mandiri dengan ruang lingkup pelayanan kepemudaan yang masih terbatas.

Bahwa masalah kelembagaan (Immergut, 2009) tidak hanya menjadi masalah umum DPD KNPI dan Karang Taruna Kabupaten Cianjur, melainkan juga masalah utama yang bersinggungan secara koheren pada lingkungan internal Disparpora dan Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur. Permasalahan tersebut akan berkaitan dengan perkembangan kelembagaan institusi dalam menentukan tindakan untuk mencapai preferensi tertentu (March dan Olsen, 1983) melalui arah *guidelines* dan *constraints* yang diberlakukan dalam arena tindakan (Laumann dan Knoke, 1987; Di Maggio dan Powell, 1991; Skocpol, 1996). Dengan

demikian, hambatan kelembagaan akan terdapat dalam peran institusi dalam menentukan tindakan yang lebih sesuai dengan tujuan kolektif (Peters, 2012) yang memberikan implikasi terhadap konteks tertentu (Thelen, 1999). Kekuatan institusi formal (Senge, 2013) seperti regulasi konstitusi, hukum dan kebijakan (March dan Olsen, 2005) dan institusi informal seperti proses partisipasi, akuntabilitas, kesadaran politik bahkan transparansi (Sewel, 1992) dapat menjadi region magnetik penyelidikan masalah hambatan kelembagaan dalam fase implementasi kebijakan dengan berbasis pendekatan neo-institusionalisme. Melalui kekuatan institusi tersebut, tindakan implementor kebijakan terkait dapat diarahkan untuk sesuai dengan kepentingan bersama sebagai konsensus yang dipandang logis, sehingga institusi menjadi atraktor dari penyusunan kebijakan (Peters, 1979).

Analisis perkembangan kelembagaan yang dipergunakan untuk menjalankan eksplorasi terhadap perilaku dalam jaringan kebijakan yang ditentukan oleh kondisi sosial-ekonomi, lingkungan biofisikal dan pengaturan kelembagaan (Ostrom, 2011; 2015), dapat menjadi sarana yang relevan untuk mendalami hambatan kelembagaan yang dihadapi seluruh implementor kebijakan kepemudaan. Tindakan dan interaksi dari seluruh implementor terkait yang dihadapkan dengan pengaturan kelembagaan, akan membangun arena tindakan secara alami untuk memproyeksikan probabilitas pencapaian preferensi berkenaan pembangunan pemuda. Oleh karena itu, kebijakan kepemudaan dalam konteks analisis perkembangan kelembagaan tidak lain menjadi keputusan yang mencapai taraf signifikansi konsensus secara politik, sehingga arah masalah hambatan kelembagaan dalam tahap implementasi kebijakan kepemudaan secara umum tidak akan terlepas dari konteks regulasi sebagai prosedur kebijakan yang diterapkan secara tidak koheren. Bahwa pendekatan institusionalisme pilihan rasional, institusionalisme sosiologis bahkan institusionalisme historis (Clemens dan Cooks, 1999), dapat dipergunakan dalam melaksanakan penyelidikan terhadap berbagai komponen analisis perkembangan kelembagaan sebagai upaya mendalami hambatan kelembagaan secara lebih komprehensif.

Dalam pendekatan institusionalisme pilihan rasional bahwa proses pelayanan kepemudaan sebagai kebijakan distingtif dari implementor terkait tidak secara utuh dan konkrit menunjukkan pemilihan tindakan terbaik sebagai rasionalitas sempurna, karena tidak mempertimbangkan lingkungan biofisikal, peristiwa eksternal bahkan situasi aksi dalam subsistem kebijakan (Ostrom, 2010). Dalam eksternalitas apriori sebagai variabel dari lingkungan biofisik, hampir seluruh implementor terkait telah mempergunakan sumber daya cukup proporsional untuk setiap program, terkecuali Disparpora yang didominasi oleh program kepariwisataan dengan distribusi sumber daya sangat besar. Sementara

dalam konteks eksternalitas teknologi, hampir seluruh implementor terkait terkecuali Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur masih memiliki keterbatasan teknologi sebagai sarana komunikasi, akomodasi kepentingan bahkan akuntabilitas terhadap masyarakat sipil dan kelompok sasaran. Sekalipun demikian, sebagian implementor seperti DPD KNPI Kabupaten Cianjur menjalankan langkah konkrit untuk mengatasi masalah eksternalitas teknologi melalui penggunaan media sosial. Bahwa akumulasi bukti empirik seperti IPP Kabupaten Cianjur yang rendah, pelayanan kepemudaan konvensional sebagai kebuntuan kebijakan dan pendekatan pembangunan pemuda dalam praktik global sebagai guncangan eksternal tidak juga dipertimbangkan menjadi mekanisme pemilihan tindakan yang akan menghadirkan perubahan mendasar dalam skema implementasi pelayanan kepemudaan.

Ketika seluruh implementor terkait berhadapan dengan berbagai keterbatasan, maka penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dengan lingkup yang lebih luas dan hasil kebijakan yang lebih realistis dapat dijalankan melalui kerangka kerja koalisi advokasi sebagai agenda preferensi bersama berdasarkan *rule based model* dalam subsistem kebijakan. Dalam subsistem kebijakan Disparpora sebagai cerminan dari pemerintah daerah Cianjur misalnya, tidak terdapat situasi aksi yang mencerminkan kerangka koalisi advokasi, sehingga skema implementasi yang memang ditentukan Disparpora tidak memuat preferensi kelompok kepentingan manapun. Dalam aspek institusionalisme pilihan rasional bahwa masalah kelembagaan dalam implementasi kebijakan kepemudaan terdapat pada tindakan implementor yang tidak bergantung pada kepentingan sebagai preferensi yang harus dicapai. Hal tersebut karena bentuk pemilihan tindakan implementor tidak mencapai batasan intensionalitas (Weyland, 2002), padahal institusi mempunyai peran yang memang sentral dalam penyusunan kebijakan dengan mengakomodasi seluruh kepentingan (Ivanica, 2006) yang harus dibangun berdasar pada kalkulasi logis terkait berbagai probabilitas yang mungkin ada dengan mempertimbangkan konfigurasi potensi (Ingram dan Clay, 2000).

Dalam pendekatan institusionalisme sosiologis bahwa eksistensi dari institusi menunjukkan signifikansi sosial akan berkembang secara berkelanjutan yang relevan dengan perubahan tindakan (Zafirovski, 2004). Signifikansi sosial sebagai realitas kultural secara informal dapat memberikan pengaturan pemilihan tindakan rasional, yang juga secara holistik berkenaan dengan arena tindakan dan hubungan interaktif (Buhari-Gulmez, 2010), karena perubahan sosial dimulai dengan pelembagaan nilai sosial dalam masyarakat dengan bertumpu pada keberadaan institusi formal sendiri (Santoso, 2013). Bahwa atribut komunitas bahkan institusi informal (Ostrom, 2010) merupakan

trajektori normatif yang dapat memberikan dasar penyelidikan terhadap masalah kelembagaan pada tahapan implementasi. Hubungan kepercayaan sebagai atribut komunitas yang diklaim terdapat di antara implementor terkait tidak pernah ditindaklanjuti dengan pertukaran informasi, sumber daya dan keyakinan, sehingga sampai dewasa ini tidak mencerminkan hubungan timbal balik sebagai konsekuensi rasional interaksi terhadap perkembangan kepemudaan. Selain itu, identitas kultural Kabupaten Cianjur sebagai keberadaan institusi informal seperti *Ngaos, Mamaos, Maenpo, Tataten, Tangginas, Someah* dan *Sauyunan* tidak diaktualisasikan sebagai bentuk pelayanan kepemudaan. Kondisi tersebut sekaligus menjadi pertanda bahwa institusi informal belum menjadi karakteristik distingtif dari implementor kebijakan sebagai identitas kultural yang inheren.

Ketika institusi dalam analisis institusionalisme sosiologis akan memberikan arah penyelidikan terhadap nilai dan identitas kultural yang telah melembaga secara institusional, perspektif institusionalisme historis justru menekankan keberadaan institusi dalam samaran kontinum yang terikat secara koheren dengan dimensi dari ruang dan waktu. Oleh karena itu, penguatan konstruksi dalam perspektif institusionalisme historis yang dilakukan oleh Kathelen Thelen pada tahun 1994 (Mahoney, 2017; Bleich, 2017) tidak hanya terkait regulasi, melainkan juga tentang kebiasaan, standar moral, norma dan ide (Skocpol dan Pierson, 2002; Sorenson, 2015), namun eksistensi institusi dan arena tindakan berbasiskan konsensus dalam trajektori kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan kelaziman, lintasan waktu, *conjuncture* dan persebaran ide pada institusi. Bahwa setiap implementor kebijakan tidak secara ekspresif menunjukkan resistensi terhadap perubahan yang lumrah ditemukan dalam jalur kelaziman. Sekalipun lingkungan strategis menuntut adanya perubahan cukup moderat, pemilihan tindakan sebagai skema implementasi yang repetitif tidak akan secara tegas menunjukkan resistensi karena proses perubahan tersebut membutuhkan koalisi advokasi mapan dengan sumber daya yang besar. Tidak terlalu mengejutkan ketika skema implementasi mempunyai *conjuncture* yang abstrak, karena memang tidak lahir dari proses interaksi dengan implementor lain sebagai konsekuensi logis dari situasi sosial-ekonomi, lingkungan biofisik termasuk pengaturan kelembagaan. Sekalipun demikian, transaksi persebaran ide tentang transformasi pelayanan yang moderat cukup melembaga di lingkungan internal DPD KNPI serta Karang Taruna Kabupaten Cianjur.

3.3.3 Peran Institusi dalam Membangun Desain Evaluasi Kebijakan Kepemudaan

Bahwa seluruh implementor kebijakan kepemudaan memiliki desain evaluasi yang lebih mendekati evaluasi semu sebagai pendekatan evaluasi berbasis metode deskriptik dalam

melakukan penilaian tentang hasil kebijakan tanpa lebih seksama menyelidiki implikasi kebijakan terhadap kelompok sasaran. Dalam evaluasi semu memang terdapat paradigma bahwa hasil kebijakan merupakan kondisi yang dapat terbukti secara alamiah (Dunn, 2008). Implementor kebijakan terkait secara umum mempergunakan metode perbandingan untuk melakukan penyelidikan terkait taraf kohesivitas antara perencanaan dan implementasi program kepemudaan yang tidak dapat diverifikasi sebagai representasi metode evaluasi semu dalam praktik global. Karena bagaimanapun dalam evaluasi semu hanya terdapat metode analisis waktu terputus, nilai angka indeks, analisis diskontinuitas, analisis berkala terkontrol atau paling tidak tampilan grafik. Teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk lebih menunjang evaluasi kebijakan misalnya *focus group discussion*, survei, wawancara terstruktur dan studi dokumentasi (Subarsono, 2021: Suharsono, 2016) tidak pernah dilakukan, karena hanya terkonsentrasi pada observasi ketika pelayanan dilakukan pada waktu tertentu.

Setiap implementor kebijakan terkait juga tidak pernah melakukan pengujian terhadap desain evaluasi kebijakan, karena hal demikian belum melembaga dalam lingkungan internal. Model pengujian keabsahan desain evaluasi kebijakan berbasis model rasional Clemens dan McBeth (2020) misalnya secara faktual belum dikenal oleh implementor terkait, karena terus bertumpu pada desain evaluasi konvensional. Selain itu, dalam evaluasi yang sampai dewasa ini dilaksanakan oleh implementor terkait tidak terdapat kualifikasi spesifik untuk melakukan penilaian terkait kinerja implementasi kebijakan kepemudaan seperti implikasi terhadap kelompok sasaran, implikasi limpahan, pembiayaan (Dye, 2017), efektivitas, kecukupan, responsivitas program, ketepatan (Dunn, 2008) bahkan ekonomi produktif (Knoefel dkk., 2007). Setiap implementor terkait juga memberikan klaim tidak terdapat hambatan krusial dalam tahapan implementasi, karena memang masih mempergunakan pendekatan yang tidak dapat diverifikasi dalam analisis kebijakan publik. Inkonsistensi antara desain dan metode evaluasi secara normatif menunjukkan bahwa setiap implementor memiliki hambatan terkait psikologi, ekonomi, teknis, politik maupun keterbatasan evaluator (Subarsono, 2021) sebagai bagian analisis kebijakan publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian tersebut, maka harus dilakukan penarikan kesimpulan sebagai proses generalisasi berkaitan beberapa hal. *Pertama*, pemuda di Kabupaten Cianjur mempunyai respons dan keinginan keterlibatan yang cukup besar untuk aktif terlibat dalam pelayanan kepemudaan baik sesuai kerangka kebijakan nasional maupun pembangunan pemuda berbasis pendekatan

Organisasi 4-H. *Kedua*, pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna Kabupaten dan Gerakan Pramuka Kwarda Cianjur secara normatif menunjukkan kohesivitas trajektori terhadap prosedur kebijakan kepemudaan secara nasional dan pembangunan pemuda berbasis penguatan modal sosial dalam praktik global sekalipun masih terbatas tingkat signifikansi pra konsep yang belum otonom, sehingga untuk dewasa ini belum dapat mereduksi pemetaan potensi permasalahan kepemudaan. *Ketiga*, kekuatan institusi formal dan informal yang ada belum secara holistik memberikan *guidelines* dan *constraints* baik dalam pemilihan tindakan dari implementor terkait, dalam melakukan kalkulasi sebagai proyeksi probabilitas dari hambatan pada tahapan implementasi maupun dalam membangun desain evaluasi kebijakan kepemudaan yang dapat diverifikasi dalam praktik global.

5. REFERENSI

- Alcazar, M.V. (2019). Feminism, Youth, and Women Who Rock: Rocking is also a Way to Fight. Dalam H. Cuervo & A. Miranda (Penyunting), *Youth, Inequality and Social Change in the Global South* (hlm. 99-111). Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3750-5_7.
- Algan, Y., Cahuc, P., & Shleifer, A. (2013). Teaching Practices and Social Capital. *American Economic Journal: Applied Economics*, 5(3), 189–210. [doi:10.1257/app.5.3.189](https://doi.org/10.1257/app.5.3.189).
- Anaya, H.D., Cantwell, S.M., & Rotheram-Borus, M.J. (2003). Sexual Risk Behaviors among Adolescents. Dalam A. Biglan., M.C. Wang., & H.J. Walberg (Penyunting), *Preventing Youth Problems* (hlm. 113-143). Boston: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6236-5_6.
- Ashta, A. (2020). *A Realistic Theory of Social Entrepreneurship A Life Cycle Analysis of Micro-Finance*. Palgrave Pivot. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-32142-0>.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2019). *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Baum, W.M. (2021). Introduction to Molar Behaviorism and Multiscale Behavior Analysis. Dalam D. Zilio & K. Carrara (Penyunting), *Contemporary Behaviorisms in Debate* (hlm. 43-62). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77395-3_4.
- Benson, P.L. & Pittman, K.J. (2001). *Trends in Youth Development: Visions, Realities and Challenges*. Boston: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1459-6>.
- Benson, P.L., Flay, B., & Foster, S.L. (2003). The Prevention of Drug Abuse. Dalam A. Biglan., M.C. Wang., & H.J. Walberg (Penyunting), *Preventing Youth Problems* (hlm. 87-111). Boston: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6236-5_5.
- Berman, S. (1998) *The Social Democratic Moment: Ideas and Politics in the Making of Interwar Europe*. Cambridge: Harvard University Press.
- Biglan, A. & Severson, H.H. (2003). The Prevention of Tobacco Use. Dalam A. Biglan., M.C. Wang., & H.J. Walberg (Penyunting), *Preventing Youth Problems* (hlm. 63-85). Boston: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6236-5_4.
- Bottrell, D. & Pessoa, A.S.G. (2019). Waiting, Belonging and Social Change: Marginal Perspectives from Sao Paulo and Melbourne. Dalam H. Cuervo & A. Miranda (Penyunting), *Youth, Inequality and Social Change in the Global South* (hlm. 129-145). Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3750-5_9.
- Bouckaert, L. & van den Heuvel, S. (2019). *Servant Leadership, Social Entrepreneurship and the Will to Serve: Spiritual Foundations and Business Applications: Spiritual Foundations and Business Applications*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-29936-1>.
- Bowers, E. dkk. (2015). *Promoting Positive Youth Development: Lessons from the 4-H Study*. Clemson, South Carolina: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-17166-1>.
- Buhari-Gulmez. (2010). Stanford School on Sociological Institutionalism: A Global Cultural Approach. *International Political Sociology*, 4(3), 253-270. <https://doi.org/10.1111/j.1749-5687.2010.00104.x>.
- Bybee, R.W. (1977). The New Transformation of Science Education. *Science Education*, 61(1), 85-97.
- Cerbino, M., Panchi, M., & Voirol, J. (2019). Marginal Images: Youth and Critical Subjectivities from Art as a Resource. Dalam H. Cuervo & A. Miranda (Penyunting), *Youth, Inequality and Social Change in the Global South* (hlm. 223-238). Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3750-5_15.
- Clemens, E.S. & Cook, J.M. (1999). Politics and Institutionalism: Explaining Durability and Change. *Annual Review of Sociology*, 25(1), 441–466. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.25.1.441>.
- Clemons, R.S. & McBeth, M.K. (2020). *Public Policy Praxis: A Case Approach for Understanding Policy and Analysis (Fourth Edition)*. New York: Routledge.

- Creswell, J. & Clark, V.P. (2007). *Designing dan Conducting Mixed Methods Research*. California: Sage Publications.
- Creswell, J. (2015). *Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daly, M. (1973). *Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Womens's Liberation*. Boston: Beacon Press.
- De Bruijn, H. & Heuvelhof, E. (2002). Policy Analysis and Decision Making in a Network: How to Improve the Quality of Analysis and the Impact on Decision Making. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 20(4), 232–242.
<https://doi.org/10.3152/147154602781766627>.
- Deutsch, N.L. (2017). *Why After-School Matters for Positive Youth Development: Integrating Research into Practice and Policy*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-59132-2>.
- Di Maggio, P. & Powell, W. (1991). *The New Institutionalism In Organizational Analysis*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Dimitrova, R. & Wiium, N. (2021). *Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy and Practice in Global Contexts*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-70262-5>.
- Donahoe, J.W. (2021). Biological Behaviorism. Dalam D. Zilio & K. Carrara (Penyunting), *Contemporary Behaviorisms in Debate* (hlm. 113-135). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-77395-3_10.
- Dowding, K. (2001). There Must Be End to Confusion: Policy Networks, Intellectual Fatigue, and the Need for Political Science Methods Courses in British Universities. *Political Studies*, 49(1), 89–105.
<https://doi.org/10.1111/1467-9248.00304>.
- Dunn, W.N. (2008). *Public Policy Analysis: An Intrduction Fouth Edition*. New Jersey: Pearson Education.
- Duverger, M. (2014). *Sosiologi Politik*. Terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dye, R.T. (2016). *Understanding Public Policy (Fifteenth Edition)*. Pearson Education.
- Fadeyi, O. dkk. (2015). Impact of Youth Entrepreneurship in Nation Building. *International Journal of Academic Research in Public Policy and Governance*, 2(1), 27-40.
<http://dx.doi.org/10.6007/ijarppg/v2-i1/1714>.
- Fahmy, E. (2006). Social Capital and Civic Action. *Young*, 14(2), 101–118.
<https://doi.org/10.1177/1103308806062736>.
- Ferrucci, P., Hopp, T., & Vargo, C. J. (2020). Civic engagement, social capital, and ideological extremity: Exploring online political engagement and political expression on Facebook. *New media & society*, 22(6), 1095-1115.
<https://doi.org/10.1177/1461444819873110>.
- Fiske, S.T., & Krieger, L.H. (2013). Policy Implications of Unexamined Discrimination: Gender Bias in Employment as a Case Study. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 52–74). Princeton University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctv550cbm.9>.
- Flanagan, C.A. & Faison, N. (2001). Youth Civic Development: Implications of Research for Social Policy and Programs. *Social Policy Report*, 15(1), 1–16.
<https://doi.org/10.1002/j.2379-3988.2001.tb00040.x>.
- Flanagan, C.A. & Sherrod, L.R. (2010). Youth Political Development: An Introduction. *Journal of Social Issues*, 54(3), 447–456.
<https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1998.tb01229.x>.
- Foxall, G.R. (2021). Intentional Behaviorism. Dalam D. Zilio & K. Carrara (Penyunting), *Contemporary Behaviorisms in Debate* (hlm. 151-189). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-77395-3_13.
- Fu, J. (2019). Prefigurative Politics in Chinese Young People's Online Social Participation. Dalam H. Cuervo & A. Miranda (Penyunting), *Youth, Inequality and Social Change in the Global South* (hlm. 255-268). Singapore: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-981-13-3750-5_17.
- Fukuyama, F. (2004). *The End of History and the Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Terj. M. H. Amrullah. Yogyakarta: CV. Qalam.
- Fukuyama, F. (2010). *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Terj. Ruslani. Yogyakarta: CV. Qalam.
- Fukuyama, F. (2016). *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstruksi Tatanan Sosial*. Terj. Ruslani. Yogyakarta: CV. Qalam.
- Galston, W.A. (2009). Political Feasibility: Interests and Power. Dalam R.E. Goodin, M. Moran & M. Rein (Penyunting), *Handbook of Public Policy*. New York: Oxford University Press.
- Gil Clary, E. & Rhodes, J.E. (2006). *Mobilizing Adults for Positive Youth Development*. Boston: Springer. <https://doi.org/10.1007/0-387-29340-X>.
- Gil-Garcia, J.R., Pardo, T.A., & Luna-Reyes, L.F. (2017). Policy Analytics: Definitions, Components, Methods, and Illustrative Examples. *Policy Analytics, Modelling, and Informatics*, 1–16.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-61762-6_1.
- Giugni, M. & Grasso M. (2021). Youth and Politics in Times of Increasing Inequalities. Dalam M. Giugni & M. Grasso (Penyunting), *Youth and*

- Politics in Times of Increasing Inequalities* (hlm. 1-26). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63676-0_1.
- Greenwood, P.W. dkk. (1996). *Diverting Children from a Life of Crime: Measuring Costs and Benefits*. Santa Monica, CA: Rand.
- Guha, S. & Majumdar, S. (2020). *In Search of Business Models in Social Entrepreneurship: Concepts and Cases*. Singapore: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-16-0390-7>.
- Hakim, M.A.L., Darmawan, C., & Anggraeni, L. (2022). Diskursus Kebijakan Kepemudaandalam Perspektif Behaviorisme dan Neo-Institusionalisme (Pendahuluan Studi Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Cianjur). *Jurnal Education and Development*, 10(3), 684-693. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3733>.
- Hamirul, H. & Pratiwi, W. (2020). *Inovasi dalam Pelayanan Publik*. Bandung: Pena Persada.
- Hardin, C.D. & Banaji, M.R. (2013). The Nature of Implicit Prejudice: Implications for Personal and Public Policy. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 13-31). Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv550cbm.7>.
- Hay, C. (2004). Taking Ideas Seriously in Explanatory Political Analysis. *British Journal of Politics and International Relations*, 6(2), 142-148.
- Helliwell, J.F. & Putnam, R.D. (2007). Education and Social Capital. *Eastern Economic Journal*, 33(1).
- Henderson. dkk. (1985). *Half Humankind*. Chicago: University of Illinois Press.
- Holecz, V., Fernández, G.G.E., & Giugni, M. (2021). Youth's Socializing Spheres in Switzerland: Educational, Recreational, and Community Activities. Dalam M. Giugni & M. Grasso (Penyunting), *Youth and Politics in Times of Increasing Inequalities* (hlm. 57-82). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63676-0_3.
- Hoppe, R. & Peterse, A. (1993). *Handling Frozen Fire*. Boulder, CO: Westview Press.
- Howlett, M. & Mukherjee, I. (2018). The Contribution of Comparative Policy Analysis to Policy Design: Articulating Principles of Effectiveness and Clarifying Design Spaces. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 20(1), 72-87. <https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1418223>.
- Immergut, E.M. (2009). *Institutional Constraints on Policy*. Dalam R.E. Goodin, M. Moran, & M. Rein (Penyunting), *Handbook of Public Policy*. New York: Oxford University.
- Ingram, P. & Clay, K. (2000). *The Choice-Within-Constraints* New Institutionalism and Implications for Sociology. *Annual Review of Sociology*, 26(1), 525-546. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.525>.
- Ivanica, M. (2006). Theoretical Approaches to the Institutions of the Integrative Structures. *Administration and Public Management Review*, (7), 117-125.
- Iwilade, A. (2019). Temporalities of 'Doing': The Over-Youth and Their Navigations of Post-violence Contexts in Africa. Dalam H. Cuervo & A. Miranda (Penyunting), *Youth, Inequality and Social Change in the Global South* (hlm. 85-98). Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3750-5_6.
- Jacobi, D. (2011). On the "Construction" of Knowledge and the Knowledge of "Construction." *International Political Sociology*, 5(1), 94-97. https://doi.org/10.1111/j.1749-5687.2011.00122_4.x.
- Jacobs, D.F. (2005). Youth Gambling in North America. Dalam J.L. Derevensky & R. Gupta. (Penyunting), *Gambling Problems in Youth* (hlm. 1-24). Boston: Springer. https://doi.org/10.1007/0-306-48586-9_1.
- John, P. (2003). Is There Life After Policy Streams, Advocacy Coalitions, and Punctuations: Using Evolutionary Theory to Explain Policy Change?. *Policy Studies Journal*, 31(4), 481-498. <https://doi.org/10.1111/1541-0072.00039>.
- Kahne, J., Chi, B., & Middaugh, E. (2006). Building Social Capital for Civic and Political Engagement: The Potential of High-School Civics Courses. *Canadian Journal of Education/Revue Canadienne de L'éducation*, 387-409. <https://doi.org/10.2307/20054169>.
- Kalogeraki, S. (2021). Inequalities in Young Adults' Electoral and Non-institutionalised Modes of Political Participation in Greece: Similar or Diverse Patterns?. Dalam M. Giugni & M. Grasso (Penyunting), *Youth and Politics in Times of Increasing Inequalities* (hlm. 127-158). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63676-0_6.
- Karupiah, P. (2019). Femininity in Everyday Life: Experiences of Malay and Indian Women in Malaysia. Dalam H. Cuervo & A. Miranda (Penyunting), *Youth, Inequality and Social Change in the Global South* (hlm. 113-128). Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3750-5_8.
- Kiess, J. (2021). Class Against Democracy? Family Background, Education, and (Youth) Political Participation in Germany. Dalam M. Giugni & M. Grasso (Penyunting), *Youth and Politics in Times of Increasing Inequalities* (hlm. 29-56). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63676-0_2.

- Kim, J.Y. (2005). "Bowling Together" isn't a Cure-All: The Relationship between Social Capital and Political Trust in South Korea. *International Political Science Review*, 26(2), 193–213. <https://doi.org/10.1177/0192512105050381>.
- Kim, J.Y. (2006). The Impact of Internet Use Patterns on Political Engagement: A Focus on Online Deliberation and Virtual Social Capital. *Information Polity*, 11(1), 35–49. <https://doi.org/10.3233/ip-2006-0087>.
- Kisby, B. (2007). Analysing Policy Networks. *Policy Studies*, 28(1), 71–90. <https://doi.org/10.1080/01442870601121502>.
- Knapp, G. & Waechter, N. (2021). Social Transformation of Youth and Youth Cultures in Europe: Trends, Theories and the Relevance of Youth Cultural Scenes. Dalam G. Knaap & H. Krall (Penyunting), *Youth Cultures in a Globalized World* (hlm. 23-41). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65177-0_3.
- Knoefpel, P. dkk. (2017). *Public Policy Analysis*. Bristol: The Policy Press University of Bristol.
- Kompas. (2019). *Sepanjang 2019, 71 Penderita HIV/AIDS di Cianjur dari Kalangan Lelaki Seks Lelaki*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/12/03/08012371/sepanjang-2019-71-penderita-hiv-aids-di-cianjur-dari-kalangan-lelaki-seks?page=all>.
- Krall, H. & Knapp, G. (2021). Youth Cultures, Lifeworlds and Globalisation—An Introduction. Dalam G. Knaap & H. Krall (Penyunting), *Youth Cultures in a Globalized World* (hlm. 1-10). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65177-0_1.
- Kubiliene, N. dkk. (2014). The Response of Youth to Racial Discrimination: Implications for Resilience Theory. *Journal of Youth Studies*, 18(3), 338–356. <https://doi.org/10.1080/13676261.2014.963535>.
- La Due Lake, R. & Huckfeldt, R. (1998). Social Capital, Social Networks, and Political Participation. *Political Psychology*, 19(3), 567–584. <https://doi.org/10.1111/0162-895x.00118>.
- Lasan, N. (2014). European Union Intervention in the Iranian Crisis-A Sociological Institutional Perspective. *Romanian Journal of European Affairs*, 14(1), 49.
- Laumann, O. E. & Knoke, D. (1987). *The Organizational States: Social Change in National Policy Domains*. Madison: The University of Wisconsin Press.
- Lecours, A. (2005). *New institutionalism: Theory and Analysis*. Toronto: University of Toronto Press.
- Lentsch, J. (2019). *Political Entrepreneurship: How to Build Successful Centrist Political Start-ups*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-02861-9>.
- Long, E.T. (2000). *Twentieth-Century Western Philosophy of Religion*. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.
- Lopes, C.E. (2021). What Is the Theory of Theoretical Behaviorism?. Dalam D. Zilio & K. Carrara (Penyunting), *Contemporary Behaviorisms in Debate* (hlm. 97-105). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77395-3_8.
- Lundström, A. dkk. (2014). *Social Entrepreneurship: Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-01396-1>.
- Mahoney, J. (2017). Shift Happens: The Historical Institutionalism of Kathleen Thelen. *PS: Political Science & Politics*, 50(04), 1115–1119. <https://doi.org/10.1017/S1049096517001494>.
- March, J.G. & Olsen, J.P. (1983). The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life. *American Political Science Review*, 78(03), 734–749. <https://doi.org/10.2307/1961840>.
- March, J.G. & Olsen, J.P. (2005). Elaborating the "New Institutionalism". Dalam R.A.W. Rhodes & B. Rockman (Penyunting), *The Oxford Handbook of Political Institutions*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0008>.
- March, J.G. & Smith, M. (2000). Understanding Policy Networks: Towards a Dialectical Approach. *Political Studies*, 48(1), 4–21. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.00247>.
- Marques, J. & Dhiman S. (2020). *Social Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-39676-3>.
- Marsh, D. & Rhodes, R.A.W. (1992). *Policy Networks in British Government*. Oxford: Oxford University Press.
- Media Indonesia. (2019). *Pengidap HIV/AIDS di Cianjur Didominasi Homoseksual*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/401140/pengidap-hiv-aids-di-cianjur-didominasi-homoseksual>.
- Mikkelsen, M. (2006). Policy Network Analysis as a Strategic Tool for the Voluntary Sector. *Policy Studies*, 27(1), 17–26. <https://doi.org/10.1080/01442870500499868>.
- Moeliono, L., Anggal, W., & Piercy, F. (1999). HIV/AIDS-Risk for Underserved Indonesian Youth. *Journal of HIV/AIDS Prevention & Education for Adolescents & Children*, 2(3-4), 41–61. https://doi.org/10.1300/j129v02n03_04.

- Mokwena, S. (2007). Youth and Nation Building in South Africa: From Youth Struggles to Youth Development. In *Work with Youth in Divided and Contested Societies*, (61-71). https://doi.org/10.1163/9789087903695_009.
- Muhaemin, N.M. (2021). Bonus Demografi Jawa Barat dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah Jawa Barat?. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 201-222. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.269>.
- Mulya, T.W. (2019). From Vulnerable to Responsible Youth? Indonesian Youth Resisting the Dominant Discourse of Sexual Health. *Psychology & Sexuality*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/19419899.2019.1604566>.
- Nakkula, M.J. dkk. (2010). *Building Healthy Communities for Positive Youth Development*. Boston: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5744-3>.
- Nilan, P. dkk. (2011). Indonesian Youth Looking Towards the Future. *Journal of Youth Studies*, 14(6), 709-728. <https://doi.org/10.1080/13676261.2011.580523>.
- Ostrom, E. (2010). Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. *American Economic Review*, 100 (3): 641-72.
- Ostrom, E. (2011). Background on the Institutional Analysis and Development Framework. *Policy Studies Journal*, 39(1), 7-27. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00394.x>.
- Ostrom, E. (2015). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
- Peters, B.G. (1979). Comparative Politics, Theory and Methodology. *Perspective*, 8(1), 10-13. <https://doi.org/10.1080/00483494.1979.10740463>.
- Peters, B.G. (2012). *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism (Third Edition)*. New York: The Continuum International Publishing Group.
- Putra, F. & Sanusi, A. (2019). *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori dan Praktik*. Depok: Pustaka PL3ES.
- Quiggin, J. (2009). Economic Constraints on Public Policy. Dalam Robert E. Goodin, Michael Moran & Martin Rein (Penyunting), *Handbook of Public Policy*. New York: Oxford University.
- Rachlin, H. (2021). Teleological Behaviorism: Origins and Present Status. Dalam D. Zilio & K. Carrara (Penyunting), *Contemporary Behaviorisms in Debate* (hlm. 3-19). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77395-3_1.
- Republika. (2019). *Dinkes Cianjur Catat 94 Penderita HIV Baru*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/pxwu766718000/dinkes-cianjur-catat-94-penderita-hiv-baru>.
- Sabatier, P.A. & Jenkins-Smith, H. (1988). An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein. *Policy Sciences*, 21(2-3), 129-168. <https://doi.org/10.1007/BF00136406>.
- Sabatier, P.A. & Jenkins-Smith, H. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder, CO: Westview Press.
- Sabatier, P.A. & Jenkins-Smith, H. (1999). The Advocacy Coalition Framework: An assessment. Dalam P. Sabatier (Penyunting), *Theories of the Policy Process*. Boulder, CO: Westview Press.
- Sabatier, P.A. & Pelkey, N. (1987). Incorporating Multiple Actors and Guidance Instruments into Models of Regulatory Policymaking: An Advocacy Coalition Framework. *Administration & Society*, 19(2), 236-263. <https://doi.org/10.1177/00953997870190205>.
- Sabatier, P.A., Hunter, S., & McLaughlin, S. (1987). The Devil Shift: Perceptions and Misperceptions of Opponents. *Political Research Quarterly*, 40(3), 449-476. <https://doi.org/10.1177/106591298704000306>.
- Salas, M.M. & Sáinz, J.P.P. (2019). Youth, Labor Market Exclusion and Social Violence in Central America. Dalam H. Cuervo & A. Miranda (Penyunting), *Youth, Inequality and Social Change in the Global South* (hlm. 17-31). Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3750-5_2.
- Sánchez, G.J. & Sánchez-Montijano, E. (2019). Beyond the Nizam: Youth Political Practices in Egypt and Tunisia After the 2011 Uprisings. Dalam H. Cuervo & A. Miranda (Penyunting), *Youth, Inequality and Social Change in the Global South* (hlm. 207-222). Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3750-5_14.
- Santoso, A. (2013). *A Two Level Sociological Institutional Critique of Migrant Workers Protection: A State and Regional Analysis of Indonesia and the Philippines*. (Disertasi). University of Nottingham. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/33567525.pdf>.
- Schlager, E. & Blomquist, W. (1996). A Comparison of Three Emerging Theories of the Policy Process. *Political Research Quarterly*, 49(3), 651-672. <https://doi.org/10.1177/106591299604900311>.
- Schlager, E. (1995). Policy Making and Collective Action: Defining Coalitions Within the

- Advocacy Coalition Framework. *Policy Sciences*, 28(3), 243–270. <https://doi.org/10.1007/BF01000289>.
- Senge, K. (2013). The “New Institutionalism” in Organization Theory: Bringing Society and Culture Back In. *The American Sociologist*, 44(1), 76–95. <https://doi.org/10.1007/s12108-012-9170-5>.
- Sewell, W. H. (1992). A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation. *American Journal of Sociology*, 98(1), 1–29. <https://doi.org/10.1086/229967>.
- Shelton, J.N., Richeson, J.A., & Dovidio, J.F. (2013). Biases in Interracial Interactions: Implications for Social Policy. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (pp. 32–51). Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv550cbm.8>.
- Singh, R. & Mukherjee, P. (2019). Intergenerational Transmission of Poverty: Exploring Subjective Well-Being, Risks, Shocks, and Resilience Amongst Youth in India. Dalam H. Cuervo & A. Miranda (Penyunting), *Youth, Inequality and Social Change in the Global South* (hlm. 51-66). Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3750-5_4.
- Skocpol, T. (1996). *Clinton's Health Security Effort and the Turn Against Government in U. S. Politics*. New York: W. W. Norton.
- Skocpol, T., & Pierson P. (2002). *Historical Institutionalism in Contemporary Political Science*. In Katznelson I & Milner HV (Penyunting), *Political Science: State of the Discipline*. New York: W.W. Norton.
- Sorenson, R.L. dkk. (2009). The Family Point of View, Family Social Capital, and Firm Performance. *Family Business Review*, 22(3), 239–253. <https://doi.org/10.1177/0894486509332456>.
- Stahl, G. & Young, J. (2019). ‘ACE Boys’: Gender Discourses and School Effects in How First-in-Family Males Aspire to Australian University Life. Dalam H. Cuervo & A. Miranda (Penyunting), *Youth, Inequality and Social Change in the Global South*. (hlm. 67-81). Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3750-5_5.
- Subarsono. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsono. (2016). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Ombak.
- Thelen, K. (1999). Historical Institutionalism in Comparative Politics. *Annual Review of Political Science*, 2(1), 369-404. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.369>.
- Thomas, R.M. (2003). *Blending Qualitative and Quantitative: Research Methods in Theses and Dissertations*. California: Corwin Press.
- Tobler, A.L. dkk. (2013). Perceived Racial/Ethnic Discrimination, Problem Behaviors, and Mental Health Among Minority Urban Youth. *Ethnicity & Health*, 18(4), 337–349. <https://doi.org/10.1080/13557858.2012.730609>.
- Tyler, T. (2013). The Psychology of Cooperation: Implications for Public Policy. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (hlm. 77–90). Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv550cbm.10>.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Uslaner, E.M. (1998). Social Capital, Television, and the “Mean World”: Trust, Optimism, and Civic Participation. *Political Psychology*, 19(3), 441–467. <https://doi.org/10.1111/0162-895x.00113>.
- Vakaoti, P. (2019). Young People’s Constitutional Submissions in Fiji—Opportunities and Challenges. Dalam H. Cuervo & A. Miranda (Penyunting), *Youth, Inequality and Social Change in the Global South* (hlm. 239-254). Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3750-5_16.
- Weible, C.M. & Sabatier, P.A. (2007). A Guide to the Advocacy Coalition Framework. Dalam F. Fischer, G.J. Miller & M.S. Sidney (Penyunting), *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods* (hlm. 123-134). London: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Weyland, K. (2002). Limitations of Rational-Choice Institutionalism for the Study of Latin American Politics. *Studies in Comparative International Development*, 37(1), 57–85. <https://doi.org/10.1007/BF02686338>.
- Zafirovski, M. (2004). Paradigms for Analysis of Social Institutions: A Case for Sociological Institutionalism. *International Review of Sociology*, 14(3), 363-397.
- Zeldin, S. dkk. (2014). Conceptualizing and Measuring Youth-Adult Partnership in Community Programs: A Cross National Study. *American Journal of Community Psychology*, 54(3-4), 337–347. <https://doi.org/10.1007/s10464-014-9676-9>.

- Zhang, W. & Chia, S. C. (2006). The Effects of Mass Media Use and Social Capital on Civic and Political Participation. *Communication Studies*, 57(3), 277–297. <https://doi.org/10.1080/10510970600666974>.
- Zhao, M. & Mao, J. (2021). *Social Entrepreneurship: An Innovative Solution to Social Problems*. Singapore: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-9881-4>.
- Zhong, Z.J. (2014). Civic Engagement Among Educated Chinese youth: The role of SNS (Social Networking Services), Bonding and Bridging Social Capital. *Computers & Education*, (75), 263–273. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.03.005>.
- Zucker, R.A. (2003). Causal Structure of Alcohol Use and Problems in Early Life. Dalam A. Biglan., M.C. Wang., & H.J. Walberg (Penyunting), *Preventing Youth Problems* (hlm. 33-61). Boston: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6236-5_3.
- Zuilkowski, S.S., Samanhudi, U., & Indriana, I. (2017). “There is no Free Education Nowadays”: Youth Explanations for School Dropout in Indonesia. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/03057925.2017.1369002>.